

**Solusi Problematika Dikotomi Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam  
(Analisis terhadap Kebijakan Pendidikan Tinggi)**

**Abdul Mukit**

**Mustaqim**

**Zainal Abidin**

[muqitabdul1988@gmail.com](mailto:muqitabdul1988@gmail.com)

**Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA)**

**Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan**

**Article History:**

Received: September 6, 2021

Revised: September 15, 2021

Accepted: September 27, 2021

Published: Oktober 2, 2021

<https://doi.org/10.36835/alirfan.v4i2.4975>

**Keywords:**

dichotomy, policy,  
knowledge, *al-'ulum*, *taqsim*

**Abstract:** This study seeks to explore the problem of the dichotomy of science and its solution in Islamic Higher Education. which is analyzed in the perspective of education policy regarding higher education regulations by using the content analysis method in the study of library research.

The issue of the dichotomy of science is actually a classic issue of the dark legacy of the past colonialism which Indonesia's founding fathers have been fighting for a long time. This real effort is proven by the issuance of a joint decree initiated by the Minister of Religion, KH. Wahid Hasyim and the Minister of Education of the Republic of Indonesia regarding the implementation of religious teaching in state educational institutions which are stipulated through the Regulation of the Minister of Religion No. 3 August 11, 1950.

In the study of Islamic education, there is a classification (*taqsim*) of knowledge, the first is *al-'ulum al-diniyyah* (religious sciences) which is called religious science and the second is general science or general sciences.

In essence, Islam has never recognized the dichotomy of science (*tafriqh*), Islam only recognizes classification (*taqsim*) based on the sequence and stages of learning, starting from *fardlu 'ain* and *fardlu kifayah*. The scholars and figures have formulated solutions starting from the regulatory aspect as stated in the joint regulation of the Minister of Religion and the Minister of Education, several other strengthening regulations through the 2003 National Education System formulation and the Higher Education Regulation, or in the form of ideas and ideas such as the tree of knowledge scheme, integration, integration. -interconnection and Naquib Al-Attas' ideal idea of Islamization.

**Abstrak:** Penelitian ini berusaha mendalami problem dikotomi ilmu dan solusinya di Perguruan Tinggi Islam. yang dianalisa dalam perspektif kebijakan pendidikan tentang peraturan Pendidikan Tinggi dengan menggunakan metode *content analysis* dalam kajian *library reseacrh*.

Isu dikotomi ilmu sebenarnya adalah isu klasik warisan kelam penjajahan masa lalu yang sejak lama di perangi oleh para *founding fathers* Indonesia. Usaha riil tersebut di buktikan dengan diterbitkannya surat keputusan bersama inisiasi Menteri Agama, KH. Wahid Hasyim dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia tentang pelaksanaan pengajaran agama di lembaga pendidikan negeri yang di tetapkan melalui Peraturan Menteri Agama No. 3 Tanggal 11 Agustus 1950.

Dalam kajian pendidikan Islam, terdapat klasifikasi (*taqsîm*) ilmu, pertama adalah *al-'ulum al-diniyyah (religious sciences)* yang disebut ilmu agama dan kedua adalah ilmu umum atau *general sciences*. Pada hakikatnya, Islam tidak pernah mengenal dikotomi ilmu (*tafriqh*), Islam hanya mengenal klasifikasi (*taqsîm*) berdasarkan urutan dan tahapan pembelajaran, dimulai dari yang *fardlu 'ain* dan *fardlu kifayah*. Para ulama, tokoh sudah merumuskan solusinya mulai dari aspek regulasi sebagaimana tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, beberapa regulasi penguatan blainnya melalui rumusan sisdiknas tahun 2003 dan Peraturan Pendidikan Tinggi, atau berupa gagasan dan ide seperti, skema pohon ilmu, integrasi, intergrasi-interkoneksi maupun gagasan ideal Naquib Al-Attas berupa *Islamisasi*.

## Pendahuluan

Dalam studi ini fokus pembahasan adalah perguruan tinggi Agama Islam yang secara umum dibagi menjadi dua yaitu 1) Perguruan Tinggi Negeri disingkat PTAIN dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta disingkat PTAIS. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dikelola dan dananya hampir sepenuhnya berasal dari pemerintah, sedangkan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta pengelolaan dan pendanaannya hampir sepenuhnya berasal dari swadaya masyarakat.

Perguruan Tinggi Agama Islam atau disingkat PTAI adalah perguruan tinggi yang koordinasi dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Bidang Pendidikan Tinggi Islam (Diktis). Secara teknis akademis, pembinaan

Perguruan Tinggi Islam Negeri dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Departemen Agama. Sedangkan Output Perguruan Tinggi Agama Islam yang dimaksudkan disini adalah lulusan atau hasil keluaran yang dihasilkan dari Perguruan Tinggi Agama Islam tersebut. Upaya tokoh-tokoh Islam untuk memberdayakan umat Islam di Indonesia dalam jalur pendidikan juga diwujudkan dengan mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai sebuah lembaga lanjutan.

Menarik pernyataan Menteri Agama, Suryadharma Ali bahwa, Perguruan Tinggi Agama Islam masih kalah bersaing dengan Perguruan Tinggi lain. Penyebabnya adalah, persoalan dikotomi ilmu, agama dan ilmu umum, masih sulit untuk diselesaikan. Harusnya PTAI harusnya sudah dapat dan siap mengintegrasikan ilmu agama dan umum sebagai bahan ajar yang menyatu dalam diri mahasiswanya. Kata Suryadharma, "Jadi jangan pisahkan agama dengan ilmu lain. Semuanya berkaitan karena sumber ilmu adalah satu, Allah".<sup>1</sup> Jadi dikotomi Ilmu tersebut memang sudah disadari oleh Depag sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap nasib Perguruan Tinggi Islam.

Persoalan klasik yang jadi topik diskusi berkepanjangan yaitu tentang dikotomi ilmu dalam Islam. Terlihat misalnya ketika masih banyak yang membedakan (*tafriq*), sikap dikotomis dalam melihat *al-'ulum al-diniyyah* yang di anggap penting dan cenderung bersikap abai terhadap ilmu umum (*general sciences*). Sikap dikotomis semacam ini mulai muncul sejak lama dan ternyata sampai sekarang masih bertahan terutama di kalangan para pemikir dan praktisi pendidikan keagamaan Islam di Indonesia baik pada tingkat paradigma maupun secara teknis di kelembagaan pendidikan. Terlihat dari data diatas yang menunjukkan bahwa PTAI masih kalah bersaing dengan PTU dalam aspek pengembangan ilmu umum disebabkan dikotomi ilmu yang masih sedang terjadi. Padahal konsepsi dikotomis ini adalah warisan penjajah yang ditanamkan agar masyarakat Indonesia buta terhadap ilmu umum.

Dikotomi ilmu sebagai warisan penjajah Belanda terus menerus menjadi problem yang hingga kini masih belum tuntas terselesaikan. Pemisahan antara pendidikan Pesantren dan pendidikan Sekolah Rakyat menjadi agenda utama Penjajah untuk melanjutkan penjajahannya. Model Pendidikan Pesantren yang hanya terbatas

---

<sup>1</sup> "Pendidikan Dunia Kampus," <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/13/03/13/mjlg3-ptain-sulit-bersaing-dengan-perguruan-tinggi-lain>.

pada materi keagamaan seperti Akidah, Fiqih, Bahasa Arab dll dinilai tidak komprehensif untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak hanya “numpang lewat” di dunia namun juga dapat memakmurkan dan memimpinnya. Berbeda dengan Pendidikan yang bernama Sekolah Rakyat (SR) yang mengajari ilmu-ilmu umum seperti, Matematika, Fisika, Biologi, Ekonomi, Politik dll dianggap lebih memenuhi kebutuhan manusia. Stigma Pesantren menjadi buruk, disebut sebagai tradisional, kolot, sedangkan Pendidikan umum, Negeri lebih modern, dinamis.

Baru pada Tahun 1950, kira-kira 5 tahun seteah Indonesia merdeka usaha busuk rekayasa Belanda tersebut segera disadari dan diakhiri oleh Menteri Agama saat itu, KH. Wahid Hasyim dan Menteri Pendidikan dengan menerbitkan Peraturan bersamatentang pelaksanaan pengajaran agama di lembaga-lembaga pendidikan negeri yang di tetapkan melalui Peraturan Menteri Agama No. 3 Tanggal 11 Agustus 1950.

Pada masa KH. A.Wahid Hasyim, politik pendidikan Islam dipraktekan untuk menyadarkan umat Islam agar tidak lagi terjebak perangkap penjajah yang telah di usir. Melalui pemeberlakuan konsep modern melalui rancangan kurikulum baru di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah, Kiai Wahid Hasyim berupaya menghapus “dikotomi” di dunia pendidikan, yang oleh Evi Fatimur Rusydiyah dijelaskan upaya ini bertujuan, “agar terjadi sitesa dan integrasi antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum.”<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, terjadi *miss* paradigma dalam memahami pendidikan Islam yang seharusnya di nalar secara komprehensif. Namun banyak dari masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahaminya.<sup>3</sup>

Banyak yang keliru mempersepsikan pendidikan. Itu terlihat dalam penentuan indikator pendidikan yang lebih banyak yang lebih banyak didominasi faktor kognitif. Prestasi akademik masih dijadikan faktor utama penentu kelulusan sementara akhlak kurang diperhitungkan. Padahal kalau di dadalami, masalah-masalah yang muncul disebabkan rendahnya integritas para pelaku kebijakan barengi oleh rendahnya etos kerja masyarakat. Kesalahan utama dunia pendidikan Indonesia adalah mengabaikan

---

<sup>2</sup> Evi Fatimatur Rusydiyah, “ Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Kementrian Agama RI Masa KH. A. Wahid Hasyim,” *Al-Ibroh* 2, no. 1 (2017). 1

<sup>3</sup> Abudin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002). 37

keimanan yang seharusnya di posisikan sebagai inti kurikulum nasional sebagaimana amanat konstitusi dan UU Sisdiknas tahun 2003.<sup>4</sup>

Moral hanya sebatas teks, *transfer of knowledge* dengan mengabaikan *transfer of spiritual*, dan penanaman akhlak. Praktek korupsi, plagiarisme naskah-naskah ilmiah, jual beli kunci jawaban, suburnya conktek mencontek, korupsi waktu dalam memberikan pelajaran, adalah persoalan moral yang sudah tereduksi.<sup>5</sup>

Ini adalah tantangan pendidikan Indonesia 25 tahun ke depan. Tantangan tentang sulitnya menilai universitas yang pada umumnya terlibat hanya pada aspek kognitif manusia, dan mengabaikan nilai-nilai lainnya disebabkan program pengembangan ilmu dan teknologi, yang seakan-akan tidak berkaitan dengan keimanan dan kebudayaan, atau sekurang-kurangnya sulit menemukan keterkaitannya secara fungsional.<sup>6</sup> Bila tidak segera di hadapi, tantangan ini dapat mengakibatkan pendidikan nasional akan mengalami disfungsi.

Hal ini berbanding terbalik dengan Tujuan Pendidikan Tinggi (UU RI No.12/2012 pasal 5) yang menyatakan;

1. Berkembangnya potensi manusia agar menjadi beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan daya saing bangsa.

Sejak lama Naquib Al-Attas mengingatkan bahwa, akar persoalan umat Islam adalah *The Confusion of Knowledge* akibat dari sekulerisasi Barat. Sehingga dari Kebingungan mengenai konsep ilmu tersebut melahirkan krisis Akhlak (*The Loss of Adab*), dan Krisis kepemimpinan (*The Loss of Leadership*).

Memang miris melihat kondisi tersebut. Bayangkan dari semua tujuan yang digariskan tidak satupun yang menyentuh atau bahkan mendekatinya. Apalagi tercatat dari surat kabar diatas terdapat Universitas Islam terkemuka yang juga mengikuti mata kuliah baru tersebut. Menjadi semakin tidak nyaman, tatkala nama

---

<sup>4</sup> Ulil Amri Syafri, "Analisis Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Ber-Lafadz 'Yâ Âyyuhâ Al-LadzinaÂmanû,'" <https://insists.id/metodologi-pendidikan-akhlak-dalam-perspektif-al-quran-1/>.

<sup>5</sup> Awaluddin, "Pendidikan Sufistik Kadirun Yahya Dan Implementasinya Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan" (Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2017). 1

<sup>6</sup> Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Strategi Dan Tragedi* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009). 433

Islam yang melekat pada Universitas tersebut diikuti sertakan. Islam yang dikenal memiliki konsep yang sempurna termasuk akhlak didalamnya. Sering kita dengar pepatah agung di Pesantren berbunyi; *kesopanan lebih tinggi nilainya daripada keerdasan.*

Terlepas dari fakta yang begitu memilukan diatas, perlu kiranya kita menjawab pertanyaan mendasar tentang masih menguatnya dikotomi ilmu di perguruan tinggi terutama perguruan tinggi Islam serta bagaimana sesungguhnya persoalan sejak lama menjadi perhatian para ulama dan tokoh bangsa yang dirumuskan dalam bentuk regulasi dan tawaran ide atau gagasan.

Pertanyaan seperti diatas sangat penting untuk dijawab dengan tepat. Karena kesalahan dalam mengidentifikasi persoalan akan mengakibatkan kepada kesalahan dalam memberikan jawaban. Seperti Dokter yang salah mendiagnosa penyakit pasiennya, tentu akan mengakibatkan kesalahan dalam memberikan resep, dan tentunya sangat fatal akibatnya.

Dalam hal ini, Hadits Nabi saw. mengingatkan mengenai kata kunci yang harus disadari oleh setiap muslim;

من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم.

*Artinya; Siapa yang menginginkan dunia, maka dia wajib memiliki ilmu, siapa yang menginginkan akhirat wajib dengan ilmu, yang menginginkan keduanya wajib memiliki ilmu.*

Hadits ini memberikan penjelasan bahwa ilmu adalah kata kunci untuk menggapai tujuan dan dapat menyelesaikan persoalan apapun baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan ilmu merupakan syarat utama keunggulan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Karena moral, etika, akhlak seseorang terbentuk karena *mindset* yang sesuai dengan ilmu yang menjadi ideologinya.

Berdasarkan paparan diatas bahwa ilmu adalah yang pertama dan kunci utama penyelesaian berbagai persoalan, maka tema penelitian “Solusi Problematika Dikotomi Ilmu Di Perguruan Tinggi Islam : Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi.” Sangat penting dikaji

## Pembahasan

### Metode Penelitian

Metode yang di gunakan peneliti di kajian ini, peneliti jelaskan secara singkat. Yaitu, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan studi pustaka (*library research*), melalui penelusuran yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel serta pustaka dan data lain yang berkaitan dengan objek kajian.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan dua sumber data:

#### 1. Data Primer

Yaitu data utama yang terkait objek penelitian berupa berbagai macam kebijakan pemerintah baik yang berbentuk konstitusi, Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau petunjuk teknis yang terkait dengan pendidikan tinggi.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang berkaitan dengan semua data yang terkait dengan objek kajian yang tertuang berupa buku, jurnal, artikel-artikel yang tersebar baik di *hard file* atau *soft file* di internet, dan data relevan lainnya yang terhubung dengan objek kajian ini.

### Analisa Kebijakan Pemerintah di Perguruan Tinggi

Bila berbicara tentang indikator utama peningkatan kualitas SDM salah satu unsur pentingnya adalah meningkatnya tingkat Pendidikan, disamping indikator penting lainnya.

Pada tahun 2003 Human Development Report melaporkan bahwa, nilai Human Development Index (HDI) atau Index Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia jatuh dari 0,684 menjadi 0,682, yang menyebabkan peringkat Indonesia merosot tajam dari sebelumnya di posisi 110 berubah ke posisi 112 dari 175 Negara.<sup>8</sup> Hal ini mendorong dan mengharuskan PTAI untuk melakukan perubahan.

Komitmen Tri Dharma Perguruan Tinggi di atas dirumuskan dalam PP No. 60 Tahun 1999 Pasal 3, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang berbunyi:

(1) Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

---

<sup>7</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004). 128

<sup>8</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, n.d.). 141

(2) Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

(4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 juga, telah disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa:

Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.

Pendidikan Tinggi dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yaitu,

Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian,

Yaitu sesuai dengan KEPMENDIKNAS No. 232/U/2000, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan

untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Setelah diketahui jika dikotomi ilmu dalam Pendidikan Islam yang sudah mengakar dan juga menjadi persoalan utama di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) adalah warisan Belanda, yang coba di selesaikan oleh tokoh-tokoh Islam yang ada di pemerintahan yang sadar dengan memberikan perhatian terhadap pemberdayaan Pendidikan Islam dengan upaya-upaya yang cukup efektif, seperti penerbitan SKB 3

Menteri yang baru dibuat tahun 1975 antara Menteri dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang peningkatan mutu Pendidikan di Madrasah, kemudian pada tahun 1984 dilanjutkan dengan SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pembakuan kurikulum Sekolah Umum dan Madrasah.<sup>9</sup>

SKB sebagai proses dan upaya integrasi ilmu agama dan umum, pada awalnya cukup efektif untuk penyelesaian masalah. Karena melalui SKB tersebut, baik pendidikan Agama maupun umum tidak boleh lagi parsial dalam pengajaran dan pemberdayaan mahasiswanya. Namun harus integral antara ilmu agama yang menjadi pusat dan inti serta dilengkapi dengan ilmu dunia atau ilmu umum sebagai pelengkap dan penyempurna.

Dampak dari SKB tersebut dapat ditemukan di kurikulum Perguruan Tinggi. Dalam PP 60 Tahun 1999 bahwa, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi (Pasal 13 ayat 1). Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa, Program Studi bertugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesi melalui penentuan suatu kurikulum yang bertujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang baik.<sup>10</sup>

Pada umumnya lembaga Pendidikan Tinggi mempunyai dua fakultas atau bidang keilmuan, yaitu:

- 1) Fakultas ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Fakultas ini mengkaji beberapa bidang ilmu seperti: tafsir Al-Qur'an, hadis, ushul fiqh, nahwu/sharaf, balaghah, bahasa, fiqh dan sastra Arab.
- 2) Fakultas ilmu-ilmu hikmah (filsafat). Bidang kajian fakultas ini meliputi, mantiq, ilmu-ilmu alam dan kimia, musik, ilmu-ilmu eksakta, ilmu ukur, falak, ilmu-ilmu teologi, ilmu hewan, ilmu-ilmu nabati, dan ilmu kedokteran.<sup>11</sup>

Turunnya SKB tersebut dilanjutkan dengan langkah cepat Kemenag yang memberikan kesempatan luas pada PTAI untuk melakukan percepatan alih status dari Sekolah Tinggi ke Institut dan Universitas. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nur

---

<sup>9</sup> Ibid. 154

<sup>10</sup> Sudiyono, *Manajemen Pendidikan Tinggi* (Jakarta: PT. Aneka Cipta, 2004). 24

<sup>11</sup> Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001). 24

Syam menjelaskan bahwa, saat ini Kemenag RI memiliki 74 Perguruan Tinggi Islam Negeri yang terdiri dari 6 Universitas, 14 Institut dan 54 Sekolah Tinggi.

Nur Syam menegaskan bahwa, tantangan yang saat ini dihadapi oleh PTAI saat adalah masih adanya dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Sebab itu, ilmu agama harus terintegrasi dengan ilmu umum dan kebutuhan saat ini. Beralih status dari Sekolah Tinggi ke Institut, kemudian dari Institut ke Universitas menjadikan PTAI mempunyai mandat lebih luas untuk melakukan pengembangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lulusan PTAI langsung bisa masuk dalam dunia kerja yang dibutuhkan. Bukan hanya menguasai ilmu agama, lulusan PTAI harus mampu menguasai bidang lainnya. Untuk memuluskan keinginan ini, Ditjen Pendidikan Islam sudah menyusun penyesuaian kurikulum untuk menjawab tantangan itu. Dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan dan program magang kerja pada tiap mahasiswa PTAI.<sup>12</sup>

### **1. Solusi Dikotomi Ilmu di Perguruan Tinggi Islam**

Paling tidak kita dapat menyimpulkan secara sederhana mengenai penyebab terjadinya dikotomi ilmu tersebut;

*Pertama*, penyebab hulu yaitu akomodasi kepentingan penjajahan Belanda untuk menjauhkan bangsa Indonesia dari cerdas dan paham ilmu umum dan membiarkan mereka senantiasa dalam kebodohan. Karena penjajah benar-benar menyadari bahwa peningkatan kecerdasan bangsa yang dijajah akan mengancam kepentingan penjajah.

*Kedua*, hegemoni dari proses Sekularisasi di Barat. Dimana Barat menjauhkan negara dan kehidupan dari nilai-nilai agama. Agama harus berada di ruang privat yang tidak ada kaitannya dan tidak boleh berurusan dengan ruang publik. Peran agama di Barat di nihilkan, diasingkan, dipinggirkan dan akhirnya ditiadakan sama sekali.

Berbeda dengan kepentingan kolonialisme di atas, sejak awal Islam tidak pernah mengenal istilah dikotomi ilmu. Sepanjang pendalaman dan penalaran terhadap sumber utama agama Islam yaitu, Al-quran maupun Hadits kita tidak menemukan baik secara tersirat apalagi tersurat satu dalilpun mengenai dikotomi ilmu. Justru

---

<sup>12</sup> "Pendidikan Dunia Kampus."

sebaliknya Islam mengajarkan umatnya untuk menuntut ilmu tanpa membeda-bedakannya. Dalam al-Qur'an Allah berfirman(QS. Al-Mujadalah [58]: 11).[22]:

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

Ayat di atas menjelaskan motivasi lebih dan dorongan kuat agar umat Islam menjadi 'alim yang disediakan posisi tinggi yang bertingkat-tingkat. Umat Islam tidak cukup beriman tapi juga harus berilmu.

Hal ini dikuatkan oleh Nabi Saw juga bersabda:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Artinya; "Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim (lelaki maupun perempuan)".

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa;

الحكمة ضالة المؤمن فليلتقطها أين وجدها

Artinya; Hikmah (ilmu) adalah barang mukmin yang hilang, maka pungutlah dimanapun ditemukan.

Azyumardi Azra menjelaskan upaya Perguruan Tinggi Islam dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dia membaginya dalam tiga model; *Pertama*, model sistem dan substansi keilmuan ditempatkan dalam satu atap. Dengan cara ilmu-ilmu umum dilmbagikan pada Fakultas umum, sedangkan ilmu agama pada Fakultas Agama seperti yang terjadi di Universitas Al-Azhar, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah dll.

*Kedua*, model yang dibangun atas gagasan Islamisasi ilmu Al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas seperti yang terlihat di Universitas Antar Bangsa Malaysia maupun Pakistan.

*Ketiga*, model yang dikembangkan oleh IAIN atau UIN yang menempatkan ilmu agama sebagai inti sedangkan ilmu umum adalah suplemen.<sup>13</sup>

Dalam bukunya tersebut Azyumardi lebih memilih proses integrasi yang dilakukan oleh UIN dibandingkan dua model pertama. Menurutnya, Model pertama secara substansi masih memberlakukan dikotomi karena masih ada pemisahan Fakultas Agama dan Umum. Sedangkan konsep Islamisasi ilmu yang disampaikan oleh Ismail Al-Faruqi dan Al-Attas dianggap masih abstrak dan penuh dengan persoalan.

---

<sup>13</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi Dan Demokratisasi* (Jakarta: Kompas, 2006). 15-16

Ditambah lagi pembukaan jurusan umum di UIN, program rekrutmen besar-besaran tenaga pengajar yang kebanyakan adalah lulusan PTN umum, akhirnya secara tidak langsung menambah masalah baru. Sebab secara metodologis dan keilmuan, para dosen-dosen baru tersebut jelas berbeda dengan pola dan sistem berpikir tentang ilmu-ilmu keagamaan yang dikembangkan di UIN. Yang tentu hal ini dapat menimbulkan *gap* dan pertentangan antara dosen agama dan umum. Paling tidak, dapat menyebabkan kebingungan di antara mahasiswa.

Sedikit contoh, misalnya bila ada seorang dosen menyatakan bahwa sumber ilmu adalah indera dan metodenya adalah observasi, sementara yang lain menyatakan sumbernya adalah intuisi (*kasyf*) dan pembersihan hati (*riyadlah*) merupakan metodenya. Maupun bila ada dosen menjelaskan bahwa ilmu yang di gelutinya netral, empirik yang tidak kaitannya dengan agama, sementara di lain sisi dosen satunya menjelaskan bahwa tidak ada satupun disiplin ilmu yang netral dan lepas dari pantauan teks suci.<sup>14</sup> Kenyataan itu benar-benar terjadi nyaris di semua UIN, termasuk UIN Jakarta sebagaimana disinyalir Mulyadhi Kartanegara.<sup>15</sup>

Persoalan ini sangat serius yang bisa menimbulkan *confussion of knowledge* yang besar di ingatan mahasiswa, dan harus segera diselesaikan. Untuk mengatasi persoalan tersebut beberapa solusi ditawarkan. Imam Suprayogo (*Rekonstruksi Paradigma Keilmuan Perguruan Tinggi Islam*), menjelaskan salah satunya. Menurutnya, pihak-pihak pimpinan Universitas Islam Negeri sebenarnya sudah merumuskan dan membuat langkah penyelesaian. Imam memperkenalkan solusi yang di beri nama “program integrasi ilmu pengetahuan” dengan “pohon ilmu” sebagai gambaran yang menjelaskan penempatan dan pengembangan posisi ilmu agama dan ilmu umum. Dalam pohon ilmu ini, al-Qur`an dan al-Hadits ditempatkan sebagai hasil eksperimen dan penalaran logis yang bersama-sama menjadi sumber inspirasi keilmuan, sehingga tidak sikap dikotomis terhadap ilmu agama dan umum akan dapat di hilangkan karena masing-masing bersandar pada sumber yang sama.

---

<sup>14</sup> Ahmad Taufiq Abdurrahman, “Rubrik Fokus,” *Majalah Qolam*, 2008.

<sup>15</sup> Mulyadhi, *Membangun Kerangka Ilmu Perspektif Filosofis Dalam Komaruddin Hidayat Dan Prasetyo Hendro Prasetyo (Ed) Problem Dan Prospek IAIN* (Jakarta: Depag, 2000).



Tantangan yang terbesar dalam umat manusia saat ini adalah tantangan ilmu, yaitu ilmu yang sudah mengalami westernisasi dengan menghilangkan tujuan, merubah tatanan ilmu yang ada dengan pola sekular dan paham skeptisisme yang berujung pada keraguan. Hal ini sangat bergeser jauh dari tugas ilmu yang seharusnya. Pada hakikatnya, ilmu bertugas untuk menciptakan keadilan, mewujudkan ketenangan dan kedamaian bukan malah justru menimbulkan *confussion* dan *chaos minded*, kekacauan intelektual, dan meningkatkan keraguan (*doubt*).

Al-Attas melanjutkan, solusi untuk menjawab masalah tersebut yaitu menjelaskan secara terperinci mengenai klasifikasi ilmu, meliputi *Fardlu Kifayah* dan *Fardlu 'Ain*, hakikat ilmu, hakikat manusia sebagai objek dari ilmu. Semua dikonstruksi dalam wadah bernama pendidikan. Sehingga perumusan tentang definisi dan tujuan pendidikan menjadi sangat penting. SMN menguraikannya dengan sangat lengkap; Pendidikan adalah penyerapan dan menanamkan adab pada manusia. Adapun tujuan utama pendidikan Islam bukan hanya sebatas pengembangan intelektual atas dasar manusia sebagai warga negara, yang identitas kemanusiaannya hanya diukur sesuai dengan perannya dalam kehidupan bernegara, melainkan tujuannya adalah mengembalikan manusia kepada fitrah penciptaannya (*fithratallahi alladzi fatharan nas 'alaiha*). Sebuah rumusan tujuan pendidikan yang esensial dan universal tidak hanya terikat pada kewarnegaraan namun berlaku umum pada kemanusiaan yaitu mewujudkan manusia baik (*a good men*) *as men* bukan hanya *a good citizen*, yang punya dua tugas penting sebagai hamba Allah (*'abdullah*) untuk mengikhlaskan *'ubudiyah* dan sebagai khalifah di bumi (*khalifah fil 'ardh*) untuk melakukan *'imarah*.

Semua itu dirumuskan dalam kerangka Universitas atau Perguruan Tinggi yang menjadi pusat tertinggi penyelesaian masalah diatas. Jika Universitas dapat benar-benar mengintegrasikan atau mengislamkan kata kunci kebangkitan yaitu, ilmu maka semua persoalan akan selesai.

Dan inilah yang menjadikan Islam menemukan kepastian tujuan yang selaras dengan tujuan akhirnya melalui ilmu dan klasifikasinya yang *clear*, sehingga dapat mencapai kemajuan. Tidak seperti Barat yang kebingungan menemukan tujuan akhirnya sehingga tidak dapat mengalami kemajuan.

Karena bagi SMN, kebangkitan harus dimulai dari kesadaran bukan peniruan membabi buta dan teriakan logan kosong;

Hanya jika kesadaran dapat berubah menjadi kebangkitan yang sepenuhnya, dengan bantuan matahari ilmu, maka di sana akan muncul di kalangan kita, laki-laki maupun perempuan, dengan kematangan spiritual dan intelektual serta integritas, yang akan memerankan perannya dengan kebijaksanaan dan keadilan dalam menjunjung tinggi kebenaran. ...Karena apa yang telah hilang tidak akan di peroleh melalui peniruan yang membabi buta dan teriakan slogan kosong dengan bunyi bising pembangunan yang memekakan ; mereka akan paham bahwa pembangunan tersebut tidak harus melibatkan kesesuaian islam dengan fakta-fakta dari peristiwa masa kini, yang telah jauh menyimpang dari jalan yang benar.<sup>16</sup>

Penjelasan di atas menerangkan bahwa dikotomi adalah warisan Kolonial Belanda yang sudah mengakar dan mencengkram selama ratusan tahun. Perguruan Tinggi sebagai tujuan utama dari proses Pendidikan yang dimulai dari pendidikan Dasar hingga Menengah, mempunyai peran dan tanggung jawab utama untuk menyelesaikan problem yang dihadapi bangsa.

Persoalan utama bangsa adalah persoalan ilmu, *The Confusion Of Knowledge* yang darinya melahirkan krisis Akhlak, *The Loss of Adab*, dan krisis kepemimpinan, *The Loss of Leadership*. Terdapat tiga model Perguruan Tinggi yang berupaya menyelesaikan konflik ilmu, baik yang hanya dengan membaginya berdasarkan Fakultas ilmu Agama dan umum, atau model Integrasi corak IAIN/ UIN yang masih menyisakan persoalan dan penjas, maupun model islamisasi ilmu pengetahuan cara Al-Faruqi dan Syed Naquib Al-Attas yang juga masih memerlukan perwujudan.

Perubahan harus dilakukan dengan rekonstruksi dan penentuan model yang pas dan jelas melalui usaha yang keras dan tiada henti terhadap pembenahan paradigma dan penghapusan trauma masyarakat terhadap dikotomi ilmu karena sudah ter-stigma oleh warisan penjajah tersebut.

Islam tidak pernah mengenal dikotomi ilmu, Islam hanya mengenal klasifikasi berdasarkan urutan dan tahapan pembelajaran, dimulai dari yang *Farlu 'Ain* dan *Fardlu Kifayah*. Urutan dan tahapan tersebut sangat penting diberlakukan oleh setiap model Pendidikan Islam khususnya. Karena hal tersebut terkait dengan perumusan

---

<sup>16</sup> Syed Naquib Al-Attas, *Islam Dan Sekularisme* (Bandung: Institut Pemikiran dan Pembangunan Islam (PIMPIN), 2011). Xix-xxx

tujuan serta visi dan misi Pendidikan yang dapat memberikan kontribusi kepada manusia.

Semua itu diaplikasikan di lembaga yang disebut Universitas atau Perguruan Tinggi Islam sebagai puncak dan poros penentu nasib para kaum terdidik di masa depan. Perguruan Tinggi yang dapat mencetak generasi beriman, takwa, punya ilmu pengetahuan yang luas biasa, mampu menjadi solusi terhadap setiap persoalan, mempunyai skill dan kemampuan, juga berakhlak mulia.

### **Penutup**

Islam tidak pernah mengenal dikotomi ilmu (*tafriqh*), Islam hanya mengenal klasifikasi (*taqsîm*) berdasarkan urutan dan tahapan pembelajaran, dimulai dari yang *fardlu 'ain* dan *fardlu kifayah*. Para ulama, tokoh sudah merumuskan beberapa solusinya dimulai dari peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan tahun 1950, beberapa regulasi lain melalui rumusan sisdiknas tahun 2003 dan Peraturan Pendidikan Tinggi, dilanjutkan beberapa tawaran solusi berupa gagasan dan ide mulai dari skema pohon ilmu gagasan Imam Suprayogo UIN Malang atau integrasi tawaran ide integrasi Ayzumardi Azra di UIN Jakarta ataupun gagasan ideal Naquib Al-Attas berupa *Islamisasi*. Dalam kajian ini, penulis melihat bahwa tawaran ide *islamisasi* lebih mendasar dan tepat menyelesaikan untuk masalah dikotomi.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Ahmad Taufiq. "Rubrik Fokus." *Majalah Qolam*, 2008.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Attas, Syed Naquib. *Islam Dan Sekularisme*. Bandung: Institut Pemikiran dan Pembangunan Islam (PIMPIN), 2011.
- Awaluddin. "Pendidikan Sufistik Kadirun Yahya Dan Implementasinya Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan." Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2017.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi Dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, n.d.
- Mulyadhi. *Membangun Kerangka Ilmu Perspektif Filosofis Dalam Komaruddin Hidayat Dan Prasetyo Hendro Prasetyo (Ed) Problem Dan Prospek IAIN*. Jakarta: Depag, 2000.
- Nata, Abudin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.
- — —. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Rusydiyah, Evi Fatimatur. "Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Kementerian Agama RI Masa KH. A. Wahid Hasyim." *Al-Ibroh* 2, no. 1 (2017).
- Sudiyono. *Manajemen Pendidikan Tinggi*. Jakarta: PT. Aneka Cipta, 2004.
- Surakhmad, Winarno. *Pendidikan Nasional Strategi Dan Tragedi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Syafri, Ulil Amri. "Analisis Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Ber-Lafadz 'Yâ Âyyuhâ Al-LadzînaÂmanû.'" <https://insists.id/metodologi-pendidikan-akhlak-dalam-perspektif-al-quran-1/>.
- "Pendidikan Dunia Kampus."  
<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/13/03/13/mjlg3-ptain-sulit-bersaing-dengan-perguruan-tinggi-lain>.